



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA**

**SALINAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 01 / KWK-PBG / 2009**

TENTANG

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 5 huruf a dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara RI Nomor 42 Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4865);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.33 – 570 Tahun 2005 tgl. 22 Juli 2005 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Purbalingga Propinsi Jawa Tengah;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132.33 – 571 Tahun 2005 tgl. 22 Juli 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Purbalingga Propinsi Jawa Tengah;
 3. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tanggal 14 September 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.
- KEDUA** : Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 14 September 2009

KETUA,

ttd.

HERY SULISTIYONO, ST.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum


RISNO ALIASI, SH.
Penata Tk. I
NIP. 500 104 236

**Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Purbalingga
Nomor : 01/ KWK-PBG/2009.
Tanggal : 14 September 2009.**

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2010**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	DURASI	JADWAL WAKTU		KETERANGAN	
			MULAI	BERAKHIR		
I	TAHAP PERSIAPAN					
1	Penyusunan Rancangan Regulasi /Keputusan	332		20 Agustus 2009	17 Juli 2010	
2	Surat pemberitahuan dari DPRD kepada KPU Kabupaten Purbalingga mengenai berakhirnya masa jabatan	1			26 Februari 2010	5 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
3	Pembentukan Panitia Pemilihan (PPK/PPS dan KPPS)	154		16 Oktober 2009	18 Maret 2010	
	A Pembentukan PPK		25	16 Oktober 2009	09 Nopember 2009	Paling lambat 6 bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan 2 bulan setelah pemungutan suara
	a. Pengumuman pendaftaran	7		16 Oktober 2009	22 Oktober 2009	
	b. Penyerahan berkas	5		23 Oktober 2009	27 Oktober 2009	
	c. Seleksi administrasi	3		28 Oktober 2009	30 Oktober 2009	
	d. Pengumuman hasil	1		31 Oktober 2009	31 Oktober 2009	
	e. Seleksi wawancara	5		01 Nopember 2009	05 Nopember 2009	
	f. Pengumuman hasil	1		06 Nopember 2009	06 Nopember 2009	
	g. Persiapan pelantikan	2		07 Nopember 2009	08 Nopember 2009	
	h. Pelantikan PPK	1		09 Nopember 2009	09 Nopember 2009	
	B Pembentukan PPS		15	11 Nopember 2009	25 Nopember 2009	
	a. Pemberitahuan kepada Kepala Desa/ Lurah	3		11 Nopember 2009	13 Nopember 2009	
	b. Penyerahan berkas	5		14 Nopember 2009	18 Nopember 2009	
	c. Seleksi administrasi	2		19 Nopember 2009	20 Nopember 2009	
	d. Penetapan di KPU	1		21 Nopember 2009	21 Nopember 2009	
	e. Persiapan pelantikan	2		22 Nopember 2009	23 Nopember 2009	
	f. Pelantikan PPS	2		24 Nopember 2009	25 Nopember 2009	
	C Pembentukan PPD		14	26 Nopember 2009	09 Desember 2009	Masa kerja 1 bulan (10 Desember 2009 s.d 10 Januari 2010)
	D Pembentukan KPPS		29	18 Februari 2010	18 Maret 2010	
4	Pembentukan Panwaslu Kabupaten		40	11 Oktober 2009	19 Nopember 2009	
	a. Pembentukan pokja seleksi Panwaslu	5		11 Oktober 2009	15 Oktober 2009	
	b. Pengumuman pendaftaran	7		16 Oktober 2009	22 Oktober 2009	Lewat radio dan media cetak
	c. Penyerahan berkas	5		23 Oktober 2009	27 Oktober 2009	
	d. Seleksi administrasi	4		28 Oktober 2009	31 Oktober 2009	
	e. Pengumuman hasil	1		01 November 2009	01 November 2009	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	DURASI	JADWAL WAKTU		KETERANGAN		
			MULAI	BERAKHIR			
	f.	Seleksi tertulis Panwaslu Kabupaten.	1		02 November 2009	02 November 2009	
	g.	Seleksi tertulis Panwaslu Kecamatan	1		03 November 2009	03 November 2009	
	h.	Pengumuman hasil	2		04 November 2009	05 Nopember 2009	
	i.	Pengusulan ke Bawaslu	3		06 November 2009	08 November 2009	Oleh KPU Kab.
	j.	Fit & Propertes oleh Bawaslu	5		09 November 2009	13 Nopember 2009	
	k.	Pengumuman hasil	3		14 November 2009	16 Nopember 2009	
	l.	Pelantikan Panwaslu Kab.	2		17 Nopember 2009	18 Nopember 2009	
	m.	Penyerahan hasil tes tertulis Panwaslu Kecamatan	1		19 Nopember 2009	19 Nopember 2009	
5		Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilu		140	11 November 2009	30 Maret 2010	
6		Sosialisasi		219	12 September 2009	18 April 2010	
II		TAHAP PELAKSANAAN					
	1	Pemutakhiran Daftar Pemilih		102			Pemberitahuan KPU Kab/Kota kepada Pemda untuk menyampaikan DP4 (6 bulan sebelum hari pemungutan suara)
	a.	Penyerahan DP 4 dari Pemerintah Daerah	1		-	18 Oktober 2009	
	b.	Penyusunan bahan DPS oleh KPU Kabupaten /Kota	36		19 Oktober 2009	23 Nopember 2009	
	c.	Penyerahan bahan DPS kepada PPS melalui PPK	16		24 November 2009	09 Desember 2009	
	d.	Pencocokan dan Penelitian bahan DPS	7		10 Desember 2009	16 Desember 2009	Oleh PPS dibantu PPDP
	e.	Penyusunan DPS	3		17 Desember 2009	19 Desember 2009	Oleh PPS
	f.	Pengumuman DPS dan tanggapan masyarakat	21		20 Desember 2009	09 Januari 2010	
	g.	Penyusunan DPSHP	3		10 Januari 2010	12 Januari 2010	
	h.	Pengumuman DPSHP	3		13 Januari 2010	15 Januari 2010	
	i.	Penetapan Daftar Pemilih Tetap oleh PPS	3		16 Januari 2010	18 Januari 2010	Dasar Per KPU No. 6/2007 (90 hari) ps 20
	j.	Pengumuman DPT	3		19 Januari 2010	21 Januari 2010	
	k.	Penetapan Rekapitulasi DPT oleh PPK	3		22 Januari 2010	24 Januari 2010	
	l.	Penetapan Rekapitulasi DPT oleh KPU Kabupaten/Kota	3		25 Januari 2010	27 Januari 2010	
		Penetapan Jumlah Penduduk Kab. Purbalingga oleh Bupati	1			18 Oktober 2009	Dalam rangka penghitungan jumlah dukungan calon perseorangan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	DURASI	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	BERAKHIR	
2	Pencalonan				
	Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan	48			
	a. Sosialisasi persyaratan dan prosedur Pencalonan Perseorangan	15	02 Januari 2010	16 Januari 2010	
	b. Pengumuman Syarat Dukungan Calon Perseorangan	2	17 Januari 2010	18 Januari 2010	Media Massa
	c. Pemberitahuan KPU Kabupaten/ Kota kepada PPK dan PPS	3	19 Januari 2010	21 Januari 2010	
	d. Penyerahan dokumen dukungan	1	22 Januari 2010	22 Januari 2010	
	e. Verifikasi administrasi oleh PPS	3	23 Januari 2010	25 Januari 2010	
	f. Verifikasi Faktual	7	26 Januari 2010	01 Februari 2010	
	g. Penyusunan Berita Acara	3	02 Februari 2010	04 Februari 2010	
	h. Verifikasi oleh PPK	7	05 Februari 2010	11 Februari 2010	
	i. Verifikasi oleh KPU Kabupaten/Kota	7	12 Februari 2010	18 Februari 2010	
	Pendaftaran Paslon dari Partai Politik dan Perseorangan.				
	a. Pengumuman	2	24 Februari 2010	25 Februari 2010	
	b. Pendaftaran	7	26 Februari 2010	04 Maret 2010	
	c. Penelitian	7	04 Maret 2010	10 Maret 2010	
	d. Penyampaian hasil penelitian	3	10 Maret 2010	12 Maret 2010	
	e. Perbaikan syarat calon perseorangan dan Partai	7	12 Maret 2010	18 Maret 2010	
	f. Perbaikan syarat dukungan calon perseorangan	14	05 Maret 2010	18 Maret 2010	
	g. Pemeriksaan Kesehatan Calon	3	09 Maret 2010	11 Maret 2010	
	h. Penyampaian hasil tes kesehatan	3	15 Maret 2010	17 Maret 2010	
	i. Penelitian ulang dan Pemberitahuan Hasil	7	17 Maret 2010	23 Maret 2010	
	j. Penetapan dan pengumuman Pasangan calon	2	24 Maret 2010	25 Maret 2010	
	k. Pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon	1	26 Maret 2010	26 Maret 2010	
	l. Pengumuman Laporan Hasil Kekayaan (LHKPN)	4	27 Maret 2010	30 Maret 2010	
3.	Pengadaan Barang	79	11 Januari 2010	30 Maret 2010	
	A. Pengadaan DPT				
	a. Proses Administrasi Pengadaan DPT	39	11 Januari 2010	18 Februari 2010	
	b. Pengecekan DPT di KPU	7	08 Pebruari 2010	14 Pebruari 2010	
	c. Proses Penggandaan DPT	20	11 Maret 2010	30 Maret 2010	Dilakukan oleh PPK
	d. Distribusi DPT dari PPK ke PPS	7	31 Maret 2010	06 April 2010	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	DURASI	JADWAL WAKTU		KETERANGAN	
			MULAI	BERAKHIR		
	B Pencetakan & Distribusi	61		16 Februari 2010	17 April 2010	
	a. Proses administrasi pengadaan surat suara, formulir BA, kelengkapan administrasi di TPS dan	39		16 Februari 2010	26 Maret 2010	
	b. Cetak surat suara, formulir BA, kelengkapan administrasi di TPS dan daftar pasangan calon hingga distribusi ke PPK	7		27 Maret 2010	02 April 2010	
	c. Sortir, lipat dan packing surat suara	7		03 April 2010	09 April 2010	
	d. Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK	3		10 April 2010	12 April 2010	
	e. Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi dari PPK ke PPS	3		13 April 2010	15 April 2010	
	f. Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi dari PPS ke TPS	2		16 April 2010	17 April 2010	
4	Kampanye	38				
	a. Penyusunan jadwal kampanye	6		25 Maret 2010	30 Maret 2010	
	b. Pelaksanaan kampanye	14		01 April 2010	14 April 2010	
	c. Penyampaian visi misi	1		01 April 2010	01 April 2010	Rapat Paripurna DPRD
	d. Masa tenang	3		15 April 2010	17 April 2010	
	e. Pelaporan dana kampanye	3		19 April 2010	21 April 2010	
	f. Pelaksanaan audit dana Kampanye	15		22 April 2010	06 Mei 2010	
	g. Pengumuman dana Kampanye pasangan calon	3		07 Mei 2010	09 Mei 2010	
5	Pemungutan & Perhitungan Suara	1		18 April 2010	18 April 2010	MINGGU LEGI
	a. Rekapitulasi di PPK	4		19 April 2010	22 April 2010	
	b. Rekapitulasi di KPU Kabupaten/ Kota	3		23 April 2010	25 April 2010	
	c. Penetapan hasil pemilu	1		26 April 2010		
	d. Penyampaian keberatan terhadap hasil pemilu	3		27 April 2010	29 April 2010	
	e. Bila tidak ada keberatan dilanjutkan dengan kegiatan penetapan calon terpilih	1		30 April 2010	30 April 2010	
6	TAHAPAN PELANTIKAN					
	a. Penyampaian KPU ke DPRD		3	01 Mei 2010	03 Mei 2010	
	b. Penyampaian DPRD ke Mendagri dan Pengesahan		30	04 Mei 2010	02 Juni 2010	
	c. Persiapan pelantikan		54	03 Juni 2010	26 Juli 2010	
	d. Pelantikan		1	27 Juli 2010	27 Juli 2010	Sesuai AMJ

NO	PROGRAM / KEGIATAN	DURASI	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	BERAKHIR	
	Bila ada keberatan dilanjutkan dengan kegiatan:				
7	PROSES PHPU DI MK				
	a. Pengajuan gugatan ke MK	3	27 April 2010	29 April 2010	
	b. Penyampaian Permohonan kepada Termohon	3	30 April 2010	02 Mei 2010	
	c. Penyelesaian PHPU di MK	14	03 Mei 2010	16 Mei 2010	
	d. Penetapan hasil pemilu pasca MK	1	17 Mei 2010	17 Mei 2010	
	e. Penetapan calon putaran II	1	18 Mei 2010	18 Mei 2010	
	Bila Penetapan hasil Pemilu pasca putusan MK tidak ada putaran II				
	a. Penetapan calon terpilih	3	19 Mei 2010	21 Mei 2010	
	b. Penyampaian KPU ke DPRD	3	22 Mei 2010	24 Mei 2010	
	c. Penyampaian DPRD ke Mendagri dan pengesahan	31	25 Mei 2010	24 Juni 2010	
	d. Persiapan pelantikan	32	25 Juni 2010	26 Juli 2010	
	e. Pelantikan	1	27 Juli 2010	27 Juli 2010	
TAHAPAN PILKADA PUTARAN II					
1	Sosialisasi	25	19 Mei 2010	12 Juni 2010	
2	Cetak dan distribusi	25	19 Mei 2010	12 Juni 2010	
	a. Cetak surat suara, formulir BA, kelengkapan administrasi di TPS dan daftar pasangan calon hingga distribusi ke PPK	7	19 Mei 2010	25 Mei 2010	
	b. Sortir, lipat dan packing surat suara	11	26 Mei 2010	05 Juni 2010	
	c. Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK	4	06 Juni 2010	09 Juni 2010	
	d. Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi dari PPK ke PPS	3	09 Juni 2010	11 Juni 2010	
	e. Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi dari PPS ke TPS	2	11 Juni 2010	12 Juni 2010	
3	Kampanye (penajaman visi misi)	3	7 Juni 2010	09 Juni 2010	
4	Masa tenang	3	10 Juni 2010	12 Juni 2010	
5	Pemungutan dan Perhitungan Suara	1	13 Juni 2010	13 Juni 2010	MINGGU PAHING
6	Rekapitulasi di PPK	5	14 Juni 2010	18 Juni 2010	
7	Rekapitulasi di KPU	3	19 Juni 2010	21 Juni 2010	
8	Penetapan hasil pemilu	1	22 Juni 2010	22 Juni 2010	
	Penyampaian keberatan terhadap hasil pemilu	3	23 Juni 2010	25 Juni 2010	
	Bila tidak ada keberatan dilanjutkan dengan kegiatan penetapan calon terpilih	1	26 Juni 2010	26 Juni 2010	
9.	Tahapan Pelantikan.				
	a. Penyampaian KPU ke DPRD	1	27 Juni 2010	27 Juni 2010	
	b. Penyampaian DPRD ke Mendagri & pengesahan	26	28 Juni 2010	23 Juli 2010	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	DURASI	JADWAL WAKTU		KETERANGAN	
			MULAI	BERAKHIR		
	c.	Persiapan pelantikan	3	24 Juli 2010	26 Juli 2010	
	d.	Pelaksanaan pelantikan	1	27 Juli 2010	27 Juli 2010	SELASA LEGI
		Bila ada keberatan dilanjutkan dengan kegiatan :				
10		PROSES PHPU DI MK				
	a.	Pengajuan gugatan ke MK	3	26 Juni 2010	28 Juni 2010	
	b.	Penyampaian permohonan kepada Termohon	3	29 Juni 2010	01 Juli 2010	
	c.	Penyelesaian PHPU di MK	14	02 Juli 2010	15 Juli 2010	
	d.	Penetapan hasil pemilu pasca MK	1	16 Juli 2010	16 Juli 2010	
	e.	Penetapan calon terpilih	1	17 Juli 2010	17 Juli 2010	
11		TAHAPAN PELANTIKAN				
	a.	Penyampaian KPU ke DPRD	1	18 Juli 2010	18 Juli 2010	
	b.	Penyampaian DPRD ke Mendagri & pengesahan	6	19 Juli 2010	24 Juli 2010	
	c.	Persiapan pelantikan	2	25 Juli 2010	26 Juli 2010	
	d.	Pelaksanaan pelantikan	1	27 Juli 2010	27 Juli 2010	SELASA LEGI
TAHAPAN PENYELESAIAN						
I.	a.	Laporan ke KPU Pusat dan KPU Propinsi	2	24 Mei 2010	25 Mei 2010	
	b.	Pengarsipan dan Pemeliharaan Dokumen dan Barang Inventaris	30	19 April 2010	18 Mei 2010	
	c.	Pembubaran PPK, PPS dan KPPS	1	17 Juni 2010	17 Juni 2010	Paling lambat
	d.	Evaluasi Pelaksanaan Pilkada	2	11 Juli 2010	12 Juni 2010	
	e.	Pertanggungjawaban Anggaran	1	17 Juli 2010	17 Juli 2010	Paling lambat
		Bila Terjadi Putaran II				
II.	a.	Laporan ke KPU Pusat dan KPU Propinsi	2	18 Juli 2010	19 Juli 2010	
	b.	Pengarsipan dan Pemeliharaan Dokumen dan Barang Inventaris	30	16 Juli 2010	15 Agustus 2010	
	c.	Pembubaran PPK, PPS dan KPPS	1	12 Agustus 2010	12 Agustus 2010	Paling lambat
	d.	Evaluasi Pelaksanaan Pilkada	2	09 Agustus 2010	10 Agustus 2010	
	e.	Pertanggungjawaban Anggaran	1	11 September 2010	11 September 2010	Paling lambat

Purbalingga, 14 September 2009.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
KETUA

ttd.

HERY SULISTIYONO, ST.

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum


SEKRETARIS
RISNO ALIASI, SH
Penata Tk. I
NIP. 500 104 236